



10 Besar Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Tahun 2022:

1. Bali : 99	2. Jawa Barat : 98	3. Banten : 97
Kalimantan Barat : 97		
4. Jawa Timur : 96	5. Kalimantan Tengah : 96	6. Jawa Tengah : 95
7. Sulawesi Utara : 94	8. Sulawesi Selatan : 94	9. Lampung : 94

5 Besar Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Tahun 2022:

1. Kalimantan Barat : 97	
2. Singkawang : 94	11. Kayong Utara : 83
3. Sambas : 93	12. Sanggau : 83
4. Ketapang : 92	13. Kapuas Hulu : 82
5. Pontianak : 89	14. Bengkayang : 80
6. Landak : 89	15. Sintang : 78
7. Kubu Raya : 88	
8. Mempawah : 88	
9. Sekadau : 85	
10. Melawi : 83	

5 Besar Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Tahun 2022:

1. Bali : 78,82
2. DI Yogyakarta : 78,76
3. Jawa Tengah : 78,17
4. Sulawesi Utara : 77,77
5. Kalimantan Barat : 76,17

INDEKS INTEGRITAS

Kalbar Role Model Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

*Pemprov Hadirkan Laboratorium Pemda Untuk Studi dan Wisata Edukasi

Harapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji-Ria Norsan menjadikan tata kelola pemerintahan di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadi yang terbaik, kini sudah di depan mata. Capaian-capaian prestisius terkait hal tersebut sudah mulai tampak sejak beberapa tahun terakhir.

Kalbar menurut Gubernur Sutarmidji sudah cukup layak menjadi provinsi yang bisa menjual wisata edukasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Karena memang dari berbagai aspek penilaian terhadap Pemprov se-Indonesia, Kalbar bisa dikatakan sudah yang terbaik.

Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center Prevention (MCP) misalnya, nilai Kalbar untuk tahun 2022 sudah di angka 96,74 (dibulatkan 97). Atau berada di urutan kedelapan dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia, dan urutan ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia, dan urutan pertama dari seluruh Pemda se-Kalbar.

"Artinya tata kelola pemerintahan kita (Kalbar) sudah baik. Bahkan tata kelola ASN Pemprov Kalbar, berdasarkan penilaian KPK itu sudah 100, PTSP (perizinan) sudah 100," ungkapnya.

Kemudian untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) yang juga dinilai oleh KPK, tahun 2022

Provinsi Kalbar berhasil meraih nilai 76,17. Yang menempatkan Kalbar di urutan kelima nasional setelah Provinsi Bali, DIY, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Sementara untuk realisasi pendapatan dan serapan anggaran tahun 2022, Sutarmidji menyatakan capaian Kalbar tak kalah membanggakan. Keduanya baik pendapatan, maupun serapan anggaran, sama-sama menduduki peringkat keempat nasional. Keberhasilan Kalbar menggandengkan pendapatan dan belanja berada di top lima besar nasional menjadi luar biasa, karena itu tak terjadi di provinsi lain se-Indonesia.

"Pendapatan dan belanja (Kalbar) sama-sama nomor (ranking) empat, sedangkan (provinsi) yang pendapatannya nomor satu, belanjanya nomor 32, yang pendapatan nomor dua, belanja mereka nomor 33, yang pendapatan terbaik ketiga, belanjanya urutan ke-11," ujarnya.

Belum lagi, baru-baru ini diumumkan bahwa Pemprov Kalbar berhasil menduduki peringkat dua nasional hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tahun 2022. Pemprov Kalbar mendapat predikat baik dengan skor 3,42 atau hanya satu peringkat di bawah DKI Jakarta dengan skor 3,67. "Kita (Kalbar) hanya kalah dari DKI dan target saya tahun

ini (2023) harus jadi yang pertama (di Indonesia), saya yakin kita bisa," kata Midji-sapaan karibnya.

Tak hanya itu, jika dilihat dari indeks literasi digital, Kalbar juga bisa dibilang terbaik. Dari survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Kominfo, Kalbar berada di peringkat kedua se-Indonesia. Atau hanya di bawah DI Yogyakarta, dengan nilai yang sama 3,64.

Kemudian dari program Indeks Desa Membangun (IDM), di tahun 2022 Provinsi Kalbar sudah masuk peringkat tiga besar nasional. Yakni untuk jumlah desa mandiri dengan desa mandiri sebanyak 586, Kalbar berada di urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan dari sisi persentase perbandingan jumlah desa mandiri dan jumlah desa, Kalbar dengan persentase desa mandiri 29 persen, juga berada pada urutan ketiga setelah Bali dan DI Yogyakarta.

Midji menilai desa memang penting untuk diperhatikan karena untuk membangun daerah ini semua harus berawal dari desa. Khusus di Kalbar ia menyebutkan, peningkatan jumlah desa mandiri telah melampaui target lima tahun sesuai RPJMD. Dimana dari awalnya hanya satu desa mandiri pada tahun 2018, saat ini sudah ada 586 desa mandiri.

Sementara target lima tahun sebenarnya

hanya 425 desa mandiri. Sebanyak 586 desa mandiri itu belum termasuk untuk tahun 2023 ini. "Saya memperkirakan total desa mandiri di akhir masa jabatannya nanti bisa mencapai sekitar 700-an desa, dari total 2.031 desa se-Kalbar," terangnya.

Capaian-capaian yang sudah diraih Pemprov Kalbar itu dikatakan Midji bisa dipelajari oleh pemda lain. Maka dari itu dirinya telah membangun Laboratorium (Lab) Pemda di lantai dasar Kantor Pelayanan Terpadu, Kompleks Kantor Gubernur. Fasilitas berupa aula yang dilengkapi layar berukuran besar itu bahkan diklaim bakal menjadi yang pertama di Indonesia. Karena sejauh ini belum ada daerah lain yang memiliki Lab Pemda.

"Nah saya ingin ada laboratorium Pemda. Jadi nanti ada anak-anak (pelajar) SMA se-Kalbar, ketika mereka wisata edukasi boleh datang. Untuk diberikan pengalaman, bagaimana membuat Perda, bagaimana menyusun APBD, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Intinya gubernur berharap seluruh jajaran Pemprov Kalbar tak henti selalu berinovasi. Juga berkolaborasi, bersinergi dengan semua komponen, untuk menjadikan tata kelola pemerintahan di provinsi ini menjadi yang terbaik. (bar)